

---

## KOORDINASI PENYUSUNAN RENJA PEMDA 2022-2023 UNTUK MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DASAR (AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK) DI KABUPATEN SUMEDANG

Akadun\*<sup>1</sup>, Nur Anisa Windiasri<sup>2</sup>, Nindia Putri Cahyani<sup>3</sup>, Dewi Priyanti<sup>4</sup>, Roy Amala Sulistio<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### Article history:

Received Maret 22, 2024

Revised April 20, 2024

Accepted Mei 30, 2024

---

#### Keywords:

Public Administration

Tools of Management

Coordination

Infrastruktur

Work Plans

---

### ABSTRACT

*This research aims to find out the Coordination of Preparing the 2022-2023 Regional Government Work Plan to Improve Basic Infrastructure (Clean Water and Adequate Sanitation in Sumedang Regency. What factors are the obstacles and how to overcome the obstacles. The research method used in the research is qualitative methodology. The research informants were four informants. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. Meanwhile the processing procedures in this research were data reduction, data presentation, data verification and triangulation. Based on the research results, it was concluded that coordination in preparing regional government work plans to improve basic infrastructure (clean water and adequate sanitation) was considered effective, but target achievement was still below expectations. It is necessary to increase efforts to find solutions to achieve the expected targets in the context of basic infrastructure development in the future. Including inadequate prioritization of basic infrastructure services and lack of coordination in planning. Development planning, especially through the RPJMD, is an important focus for formulating more effective policies in BAPPPEDA Sumedang district. At the end of writing this research, the researcher provides suggestions, namely that strong collaboration between sectors and government levels, a holistic approach and regular coordination meetings are needed to realize sustainable and comprehensive development goals.*



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Akadun

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angrek Situ No. 19 Sumedang

Email: [akadun@unsap.ac.id](mailto:akadun@unsap.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Infrastruktur sebagai pola penggerak pertumbuhan ekonomi, dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah (Annisa, 2021). Infrastruktur juga berpengaruh bagi peningkatan konsumsi, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata. Infrastruktur juga berpengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang tercatat 94,63% rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih atau sekitar 406.826 rumah yang mempunyai akses air bersih. Terdapat peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 95,20% atau sebanyak 409.267 rumah yang mempunyai akses air bersih. Namun kondisi tersebut masih jauh dibawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih, sehingga pemerintah masih perlu terus meningkatkan air bersih ke seluruh Desa/Kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan. Selain itu, keberadaan infrastruktur dasar juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia disuatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan pengembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai suplai, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai permintaan. Idealnya, nilai demand tidak melebihi kemampuan supply. Jika nilai demand lebih besar dari suplai, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakup tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup (basic need). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m<sup>3</sup>/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard Nasional Indonesia SNI., 19-6728.1-2002 untuk jumlah penduduk sama dengan 1 juta sebesar 150 l/orang/hari atau 55 m<sup>3</sup>/kapita/tahun.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 mencapai 3.025 mm/tahun, dengan kondisi tutupan lahan terakhir yang diamati (Tahun 2017), ketersediaan pergerakan air (runoff) sepanjang Tahun 2017 mencapai 1.334.103.864 m<sup>3</sup>/tahun. Potensi air dari sumber lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang adalah dari air sungai. Potensi air sungai yang ada di Kabupaten Sumedang dapat dimanfaatkan, terlebih Kabupaten Sumedang dilintasi oleh aliran-aliran sungai besar dan anak sungai yang membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu: 1) DAS Cimanuk meliputi Sub-DAS Cimanuk Hulu, Cipeles, Cimanuk Hilir, Cilutung, 2) DAS Citarum meliputi Sub-DAS Citarik, 3) DAS Cipunagara meliputi Sub-DAS Cikandung; dan 4) DAS Cipanas. Adapun potensi air sungai yang ada di Kabupaten Sumedang mencapai 11.333.088 m<sup>3</sup>/tahun. Bila dijumlahkan ketersediaan air di Kabupaten Sumedang mencapai 1.345.436.952 m<sup>3</sup>/tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Sumedang dalam hal ini juga perlu diperhitungkan. Perhitungan kebutuhan air terdiri dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk kegiatan non-domestik yang terdiri dari kebutuhan air untuk pertanian, industri, perkebunan dan peternakan, disesuaikan dengan aktivitas yang

terjadi di Kabupaten Sumedang. Perhitungan kebutuhan air total dilakukan dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedang masih berada pada angka 70% masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017. Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 yang baru mencapai angka 60%. Untuk mencapai target nasional sebesar 100% penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2019, akan tetapi pada tahun tersebut pun masih 79,92% masyarakat yang terlayani akses air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang masih harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih. Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah bersanitasi nasional adalah 100%. Di Kabupaten Sumedang peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan Tahun 2021 rumah tangga bersanitasi baru mencapai 95,84% dan jika dijumlahkan hanya 287.520 rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi. Namun masih di bawah Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, tentunya perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM terdiri dari 6 (enam urusan) yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu: (1) Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.; dan (2) Penerapan SPM sebagaimana warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, seperti halnya penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Peraturan perundangan yang mengamaatkannya adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS RPJMD. Salah satu yang menjadi kajiannya adalah capaian SPM berdasarkan indikator *Sustainable Development Goals*.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Bidang PPEPD bertujuan untuk memelihara hubungan yang baik antara kegiatan fisik dan kegiatan rohaniah. Koordinasi juga penting dalam organisasi yang kompleks, terutama ketika ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di berbagai bagian (Kusdinar et al., 2023). Proses penyusunan RKPD mengikuti empat pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode ilmiah, sedangkan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD.

Namun demikian, walaupun pencapaian tersebut telah dinilai cukup baik, ada beberapa indikasi masalah yang peneliti temukan terkait Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022-2023 di Kabupaten Sumedang, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang memadai menyebabkan lemahnya pengendalian dan evaluasi quality control perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang.
2. Penentuan prioritas kebutuhan layanan infrastruktur dasar tidak memadai (data dan informasi sebagai landasan pembuatan kebijakan sangat kurang) dan Perencanaan kurang terkoordinasi di Rencana Pembangunan BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.
3. Belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Dari hasil penelitian terdahulu koordinasi bahwa koordinasi yang efektif itu sudah terjalinya komunikasi yang baik, dan adanya pembagian kerja dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. (Lyawati ; 2017). Hasil Penelitian Wicaksono (2023) menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif itu dibuktikan dengan terpenuhinya informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Kesadaran dan pemahaman pentingnya koordinasi untuk menampung aspirasi, kesepakatan, dan komitmen. Selain itu, hasil penelitian terdahulu Prinato (2019) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif itu mengedepankan tujuan bersama dimana pemimpin instansi yang selalu memberikan arahan kepada anggotanya ketika terjadinya perselisihan dalam bekerja. Adapun hasil penelitian Annisa (2012) menjelaskan bahwa koordinasi yang tidak efektif itu disebabkan karena masih ada OPD yang belum memahami tugas dan peranan mereka, sehingga hubungan kerja tidak berjalan secara efektif.

Koordinasi yang tidak efektif itu berdasarkan hasil penelitian Hardianto (2019) yaitu dapat dilihat tidak adanya perencanaan strategis untuk mencapai tujuan yang tidak berjalan maksimal, pengarahan langsung yang kurang maksimal akan pelaksanaannya, serta kerjasama yang dilakukan tidak efektif.

Sedangkan Alfiandy (2021) menjelaskan bahwa koordinasi yang tidak efektif itu terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ASN, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan program penertiban disiplin ASN.

## 2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Fadli, 2021).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik sampling purposive. Teknik sampling purposive sendiri menurut Sugiyono (2017) merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat dalam Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022-2023 di Sumedang. Maka yang dijadikan informan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Informan Penelitian**

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Perencana Ahli Muda	1
2.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan anggaran	1
3.	Perencana Ahli Pertama	1
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, disusun dengan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu: (1) Studi kepustakaan (*library*); dan (2) Studi lapangan yang terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari model Miles and Huberman (Sugiyono, 2017) sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*data reduction*)
2. Penyajian Data (*data display*)
3. Verifikasi (*conclusion drawing*)

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Terdapat beberapa tahapan pelaksanaan koordinasi menurut Hasibuan (2011:87), yaitu:

1. Kesatuan Tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian Kerja
4. Disiplin

Dalam pelaksanaan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022-2023 untuk meningkatkan Infrastruktur Dasar (air bersih dan sanitasi layak), terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan, seperti memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, dan lain-lain, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian sasaran, dan membina hubungan kerjasama yang baik antara sesama karyawan. Pembahasan mengenai tahap-tahap proses Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022-2023 di Kabupaten Sumedang peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha/tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama (*common purpose*).

- a. Saling Berkegantungan Yang Menyatu

Saling berkegantungan yang menyatu mengacu pada hubungan timbal balik di mana entitas saling membutuhkan satu sama lain dan berinteraksi secara aktif. Hubungan timbal balik koordinasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) di kabupaten sumedang melalui hasil wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa langkah-langkah konkret yang diusulkan untuk memastikan ketergantungan yang seimbang antara bidang PPEP dan bidang lainnya melibatkan pembangunan mekanisme komunikasi dan koordinasi rutin, implementasi sistem monitoring dan evaluasi menyeluruh, serta pembentukan tim lintas bidang atau kelompok kerja dengan perwakilan dari berbagai bidang untuk merancang rencana kerja bersama. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi di antara berbagai bidang dalam organisasi atau lembaga.

b. Saling Ketergantungan Yang Berurutan

Saling ketergantungan yang menyatu tidak akan berjalan tanpa adanya Ketergantungan Yang berurutan (*sequential interdependence*) mengacu pada situasi di mana satu kelompok atau unit organisasi harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum kelompok atau unit lain dapat menyelesaikan tugasnya. Dalam konteks ini, potensi konflik meningkat karena ketergantungan yang berurutan memerlukan koordinasi yang baik agar semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya dengan efisien. Saling ketergantungan yang berurutan dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang efektif, terutama dalam konteks peningkatan infrastruktur dasar, diperlukan kolaborasi yang kuat antar sektor dan tingkat pemerintahan. Pendekatan holistik dan rapat koordinasi berkala menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan komprehensif.

c. Timbal balik

Setelah terjadinya saling ketergantungan yang berurutan haru adanya Timbal balik yang merujuk kepada hubungan saling memberi dan menerima antara dua pihak atau lebih. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam pertukaran barter, hubungan sosial, dan interaksi antar individu. Timbal Balik Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa pentingnya kombinasi pendekatan teknokratis dan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam merancang dan melaksanakan RKP. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keselarasan antara aspek ilmiah dan partisipatif serta memastikan bahwa pembangunan terjadi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan langsung masyarakat.

## 2. Komunikasi

Kesatuan tindakan akan berjalan dengan baik dengan adanya Komunikasi yang memainkan peran penting dalam koordinasi penyusunan rencana kerja infrastruktur dasar sejumlah unit dalam organisasi berdasarkan rentang waktu yang telah direncanakan. Dan ditentukan komunikasi digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan bersama dan tugas yang harus dilakukan untuk mencapainya.

a. Ada Tidaknya Informasi

Informasi juga dapat berperan dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama dalam proses koordinasi. Dalam indikator ini bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mampu mengembangkan informasi yang relevan. Ada tidaknya Informasi dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Informasi yang lengkap dan relevan sangat penting dalam koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak. Hal ini dikarenakan informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, pihak Bappppeda melakukan evaluasi terkait informasi per triwulan yang bertujuan untuk mengetahui koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang.

b. Ada Tidaknya Alur Informasi

Setelah adanya informasi perlu adanya alur informasi yang jelas, informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Ada tidaknya alur informasi dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumedang telah berjalan efektif, meskipun capaian target belum mencapai level yang diharapkan. Proses pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini dilaksanakan secara transisi, terkait dengan pemilihan umum serentak. Meskipun demikian,

informasi yang didapatkan dianggap relevan, namun ada kebutuhan untuk lebih giat mencari solusi guna mencapai target yang sesuai harapan. Kesadaran untuk terus meningkatkan efektivitas dan mencari solusi menjadi penting dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar di masa mendatang.

c. Ada Tidaknya Teknologi Informasi

Setelah alur informasi berjalan dengan baik perlu adanya Teknologi informasi yang memainkan peran penting dalam koordinasi, karena teknologi memungkinkan penyampaian informasi secara efisien dan efektif kepada pihak yang terlibat, serta membantu dalam mengintegrasikan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Ada tidaknya teknologi informasi dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Sejauh ini BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Sudah Menerapkan Sistem Informasi dan Teknologi seperti menggunakan platform SIPD, Penerapan *E-Planning*, Serta Implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis online.

3. Pembagian Kerja

Setelah proses Komunikasi berjalan sesuai alur tujuan maka pembagian kerja bisa dilakukan pada perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang saling melengkapi.

a. Penempatan Waktu

Dalam suatu organisasi, pelaksanaan pembagian kerja memerlukan waktu yang tepat, dan setiap organisasi pasti telah memiliki waktu tertentu untuk melaksanakan pembagian kerja kepada masing-masing karyawan. Penempatan Waktu dalam Koordinasi dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Dari penyusunan RKPD sudah ditentukan jadwal, dan pegawai bidang PPEPD harus siap sedia dalam hal yang tak terduga seperti keterlambatan bidang lain dalam memberikan rancangan perencanaan wilayah serta anggaran yang di sesuaikan harus bisa mencapai target peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumedang.

b. Beban Kerja

Setelah penempatan waktu kerja di atur maka beban kerja pada besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu hal ini untuk menentukan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, serta menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat. Beban Kerja dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Kurangnya SDM Untuk bidang PPEPD di kantor BAPPPEDA dikarenakan beban kerja yang berlebihan. Disamping itu para pegawai BAPPPEDA mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan meskipun ada hal lain yang harus dikorbankan. Begitupun sebaliknya untuk pekerjaan lapangan tidak memiliki beban kerja yang berlebihan sehingga pembangunan Infrastruktur Dasar dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

c. Spesialisasi Kerja

Spesialisasi pekerjaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap karyawan atau departemen memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Spesialisasi kerja dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa spesialisasi pekerjaan dalam koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah dalam meningkatkan Infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) sudah diterapkan dilakukan spesialisasi pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

4. Disiplin

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku.

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting yang harus ada dalam koordinasi. Ketepatan waktu tersebut merupakan salah satu bentuk disiplin. Ketepatan Waktu Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa

efisiensi penyusunan rencana harus tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan terkait peningkatan infrastruktur dasar. Efisiensi dalam penyusunan rencana kerja bisa dinilai dari beberapa sudut pandang seperti: ketepatan waktu, kualitas rencana, partisipasi publik, implementasi rencana.

b. Tanggung Jawab Yang Tinggi

Tanggung Jawab yang tinggi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki seseorang agar orang tersebut memiliki disiplin yang baik sesuai dengan misi dan nilai organisasi. Tanggung Jawab yang tinggi dalam koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa setiap pegawai Bappeda memiliki Tanggung jawab dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di dinas Bappeda meliputi koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, pembahasan tema RKP bersama dengan Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas, menginventarisasi rencana pembangunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sub Bidang Pemerintahan, mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan perangkat daerah terkait di bawah pimpinan sekretaris daerah, mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

c. Ketaatan Terhadap Kantor

Ketaatan terhadap kantor merupakan salah satu disiplin kerja guna terciptanya koordinasi. Ketaatan terhadap kantor dalam koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) melalui wawancara dengan perencana ahli muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ketaatan terhadap kantor dalam koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah dalam meningkatkan Infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) mencakup program-program ini seperti : pengembangan budaya organisasi , peningkatan kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan, system pengawasan dan pengendalian, implementasi rencana kerja, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang harus dilakukan, serta mengkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta komunikasi yang jelas kepada seluruh pegawai tentang tujuan dan manfaat dari program-program ini.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahap-tahap proses Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Infrastruktur Dasar (air bersih dan sanitasi layak) di Kabupaten Sumedang, Peneliti Menyimpulkan Bahwa Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan efektif dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumedang telah berjalan efektif, meskipun capaian target belum mencapai level yang diharapkan. Proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah saat ini dilaksanakan secara transisi, terkait dengan pemilihan umum serentak. Meskipun demikian, informasi yang didapatkan dianggap relevan, namun ada kebutuhan untuk lebih giat mencari solusi guna mencapai target yang sesuai harapan. Kesadaran untuk terus meningkatkan efektivitas dan mencari solusi menjadi penting dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar di masa mendatang. Kurangnya SDM Untuk bidang PPEPD di kantor BAPPPEDA dikarenakan beban kerja yang berlebihan. Disamping itu para pegawai BAPPPEDA mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan meskipun ada hal lain yang harus dikorbankan.

Sehingga dari seluruh rangkaian wawancara dan teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia ini berjalan dengan cukup baik, mengingat masih banyaknya hambatan yang dialami oleh Pegawai PPEPD. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi di antara berbagai bidang dalam organisasi atau lembaga. Hal ini dikarenakan informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

#### 4. CONCLUSION

Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak) dinilai efektif, tetapi capaian target masih di bawah harapan. Perlu meningkatkan Upaya untuk mencari solusi guna mencapai target yang di harapkan dalam konteks Pembangunan infrastruktur dasar di masa mendatang. Termasuk penentuan prioritas layanan infrastruktur dasar yang kurang memadai serta kurangnya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan pembangunan, khususnya melalui RPJMD, menjadikan fokus penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di BAPPPEDA kabupaten Sumedang.

## REFERENCES

- Akadun (2011). *Teknologi Administrasi Negara*. Bandung. Alfabeta
- Akadun (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung. Alfabeta.
- Andi Cudai Nur, Haedar Akib, R. N. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*.
- Anggara (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- ANNISA, R. (2021). *Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Di Kota Pekanbaru*. <http://repository.uin-suska.ac.id/58139/>
- Askolani, & Machdalena, R. J. (2014). Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt.Inti (Persero) Bandung. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 31–44. <https://ejournal.upi.edu/index.php/image/article/view/2320>
- Bintoro dan Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dimock & Dimock (1992). *Administrasi Negara*. Terjemahan. Jakarta. Rineka Cipta
- Dimock and Dimock (1964). *Pubic Administration*. New York. Holt, Rinehart and Winston Inc
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- George R. Terry. (2013). *Dasar dasar manajemen*. [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11)
- Hadi, S., Rajiani, I., Mutiani, & Jumriani. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 1, 391. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e2ppEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+pengetahuan&ots=gV368HYIR3&sig=ugm1Twmq-r6Ya9ITLRHYA6ieJi0>
- Hasibuan (2019). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kurama, L. J., & Pangkey, M. (2022). Manajemen Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Oleh Badan Lengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung Provinsi .... *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(117), 10–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/40083/35978>
- Kusdinar, R., Rukmana, E., Yunita, I., Yanti, R., Fitria, M. D., & Supriyadi, T. A. (2023). Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Bappppeda Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 8(1), 1–6. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/773>
- Lisa, L., Bernhard, T., & Rita, T. (2018). Analisis Koordinasi Dan Pengawasan Serta Hubungannya Dengan Kinerja Karyawan Pt. Berkat Nikita Waya Lansot Di Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 2378–2387.
- Mathematics, A. (2016). *Pelayanan Administrasi*. 1–23.
- MPOC, lia dwi jayanti, & Brier, J. (2020). No *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Prof. Mirrian Sjojfan Arif, M.Ec. (PA), P. D. (2014). Hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. In *Modul Universitas Terbuka* (pp. 1–56).
- Sari, R. D. (2018). Pengertian Manajemen Publik. *Repository Uin Suska*, 11–30.
- Septiani, A. I. (2018). *Pengaruh komunikasi dan koordinasi terhadap kinerja karyawan pada pt. pelabuhanindonesia 1 (persero) medan*.
- Shell, A. (2016). *Penegertian, Fungsi Dan Tujuan Koordinasi*. 1–23.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Yunita, R. (2019). Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Dalam Membangtu Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Merantui TAHUN 2018. *Jom Fisip Vol.6: Edisi Ii Juli-Desember 2019*, 6, 1–12.